

Pahlawan Devisa dalam Perspektif Media

Billy K. Sarwono

Departemen Ilmu Komunikasi–Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Kampus Universitas Indonesia, Depok 16434. Telpn: +6221 788-49018
e-mail: billysarwono@gmail.com

Abstract

The phenomenon of violence towards migrant workers (Women Employment) continue to appear, including Ruyati case is considered phenomenal because the media is very intensive. This study aims to describe the case Ruyati framed and voiced by the media through the female informants. The theory used is the concept of feminist standpoint theory and the media. This study uses framing analysis Entman. Data obtained from news sources newspaper Kompas, Media Indonesia and Republika, as all three reported cases of TKI Ruyati and more intensive than the other newspapers of the date of June 20 till July 1, 2011. The results showed: (1) The emergence of pessimistic tone of the government's performance in addressing the case of migrant workers, (2) The position of women as resource persons fewer in number than men. Quantitatively, the mass media has not shown any significant defense of the maids. Women who are victims of violence are usually not given the means to voice their position interests, and (3) speaker's tone of men emphasize improvements in the fields of politics, law, and economics associated with the maids, while the resource concerns of women migrant workers to focus on individual salvation should through high-level diplomacy.

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) terus muncul, termasuk kasus Ruyati yang dianggap fenomenal karena pemberitaan media sangat intensif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kasus Ruyati yang dibingkai dan disuarakan oleh media melalui para narasumber perempuan. Teori yang digunakan adalah *standpoint theory* dan konsep *feminist media*. Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Entman. Sumber data diperoleh dari pemberitaan koran Kompas, Media Indonesia, dan Republika, karena ketiganya memberitakan kasus Ruyati dan TKI lebih intensif dibandingkan dengan koran lain sejak tanggal 20 Juni sd 1 Juli 2011. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Munculnya nada pesimis terhadap kinerja pemerintah dalam menyikapi kasus TKI; (2) Posisi perempuan sebagai narasumber jumlahnya lebih sedikit dibanding laki-laki. Secara kuantitatif, media massa belum menunjukkan pembelaan cukup berarti kepada TKW. Kaum perempuan yang biasanya menjadi korban kekerasan tidak diberi posisi berarti untuk menyuarakan kepentingannya; dan (3) Nada suara narasumber laki-laki menekankan pembenahan di bidang politik, hukum, dan ekonomi yang terkait dengan TKW, sedangkan kepedulian narasumber perempuan berfokus pada penyelamatan individu TKW seharusnya dilakukan melalui diplomasi tingkat tinggi.

Kata kunci: kasus Ruyati dan kekerasan perempuan di media

Pendahuluan

Di Indonesia, dunia politik dan perilaku politik sering dianggap sebagai aktivitas laki-laki, maka masyarakat menganggap perempuan yang berpolitik sebagai orang yang tidak dapat diterima. Hasil jajak pendapat Kompas (21 Desember 2009:8) menunjukkan 58.9 persen pembaca tidak puas dengan kinerja anggota DPR perempuan periode 2004-2009. Selain itu 61 persen khalayak pembacanya juga berpendapat bahwa politisi ini belum berperan aktif dalam parlemen, dan bahkan 61.7 persen dari mereka belum pernah mendengar kelompok ini memperjuangkan nasib perempuan Indonesia. Gambaran ini serupa dengan studi Carroll dan Schreiber (Norris, 1997:131-132) menunjukkan bahwa peliputan terhadap pemimpin laki-laki lebih banyak daripada jumlah pemberitaan tentang presiden perempuan karena perempuan politisi dianggap tidak memiliki kompetensi untuk berkiprah di publik. Anggapan ini tidak saja disebabkan oleh faktor kultural, namun juga konstruksi media, stereotipe yang berlaku dan kalau pun perempuan mempunyai kesempatan untuk menjadi politisi, maka mereka dianggap belum melakukan tugasnya secara maksimal dan bahkan belum terdengar kiprah mereka dalam memperjuangkan kepentingan kaumnya.

Indonesia pernah memiliki presiden perempuan, dan jumlah perempuan yang duduk di DPR pun semakin bertambah, namun kuantitas kaum perempuan di DPR tidak berkorelasi dengan kebangkitan perempuan Indonesia. Hal ini juga diungkap oleh Dewi (2009) bahwa kualitas para politisi perempuan di Indonesia masih lemah. Hal ini bisa dimengerti, mengingat tak sedikit politisi perempuan yang kepeduliannya belum menyentuh persoalan atau pemberdayaan perempuan di ruang publik. Berbagai isu sensitif perempuan Indonesia, seperti nasib TKW di luar negeri yang diperkosa, disiksa, dipenjarakan bahkan dihukum mati belum mampu menggugah mayoritas wakil rakyat itu, walaupun mereka memiliki wewenang untuk melakukan advokasi, setidaknya melalui pernyataan mereka di media. Tak jarang penderitaan TKW dianggap sekedar permasalahan seseorang yang mencari rejeki di negeri orang.

Pada tanggal 20 Juni 2011, Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan Hukum Pancung

bagi Ruyati, Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Saudi Arabia tanpa pemberitaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia. Ruyati yang sering mendapat siksaan dari majikan, dan sering terlambat mendapatkan gaji, didakwa membunuh majikannya dan majikan tersebut tidak mau memaafkan perbuatan Ruyati. Media massa sangat gencar membahas terjadinya hukum pancung dari berbagai aspek: politik, ekonomi, hukum dan juga membahas berbagai komentar pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukum pancung tersebut. Kasus Ruyati dianggap fenomenal dan mencoreng harga diri bangsa ini, karena itu pemberitaannya sangat intensif. Sayangnya narasumber yang lebih banyak digunakan adalah narasumber laki-laki.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka hal yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana media membingkai kasus Ruyati dan TKW? Bagaimana gaung suara kepedulian dari narasumber (politisi) perempuan? Kajian terhadap perbedaan suara narasumber perempuan sangat penting mengingat berbagai studi produksi media sebelumnya menunjukkan bahwa bias gender dalam ruang redaksi tidak berubah sejak tahun 1996-2003 (Poindexter, 2008:175-266, Sarwono dalam Eide, Kunelius dan Kumpu 2010:213-226). Studi lain yang dilakukan Coslett, Easton dan Summerfield (1996:170-171; Sarwono, 2010: 183-184) menjelaskan bahwa ada perbedaan moral yang disuarakan perempuan dan laki-laki dalam media, walaupun hal ini tidaklah bersifat absolut. Disamping itu, munculnya suara perempuan dalam media bisa mewarnai pemberitaan yang lebih humanis, sensitif dan simpatik (Chambers, Steiner dan Fleming, 2004: 103-104). Dengan demikian, melalui empati yang dikembangkan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong munculnya perspektif gender dalam media.

Terkait dengan TKI, data terbaru (Januari-Maret 2011), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI) memperlihatkan jumlah pelayanan dokumen bagi TKI adalah 126.131, dengan rincian 36 persen TKI Formal dan 64 persen informal. Dari jumlah tersebut, penempatan TKI ke Arab Saudi yang terbesar, yaitu 34,25 persen, dan 80 persen di antaranya merupakan TKI informal.

Secara umum bisa dikatakan bahwa jumlah penempatan TKI secara legal selalu meningkat

dari tahun ke tahun. Tiga tahun belakangan ini telah ditempatkan 2.125.571 orang TKI, dengan penambahan dari 680.000 orang pada tahun 2006 menjadi 748.825 orang pada tahun 2008 (<http://ditpolkom.bnp2tki.go.id>). Terdapat pergeseran penempatan TKI dari sektor informal menuju ke sektor formal, namun pergeseran tersebut belum signifikan. Menurut data tahun 2007, penempatan pada sektor informal masih dominan yakni sekitar 72 persen. Pada tahun 2008, penempatan pada sektor informal menurun menjadi 64 persen dan sektor formal menjadi naik sebanyak 36 persen. Penempatan TKI di Kawasan Asia Pasifik, Amerika lebih banyak berada pada sektor formal (52 persen) sedangkan di Kawasan Timur Tengah (TimTeng) dan Afrika, 98 persen berada di sektor informal (<http://ditpolkom.bappenas.go.id>).

Menurut catatan Migrant CARE, pada tahun 2006-2010 (Hidayah, 2011) ada 1.105 bu-ruh migran yang meninggal di Arab Saudi yang mana sebagian di antaranya meninggal karena penyiksaan. Selain itu ribuan TKI juga mengalami perko-saan, penyiksaan dan perbudakan, pelanggaran HAM, bahkan akses terhadap keadilan bagi korban juga sangat terbatas, serta motivasi di balik perbuatan pidana tersebut tak pernah terungkap dalam ruang pengadilan.

Bagaimana proses pemberitaan TKW di media? Hal ini tentunya tak lepas dari latar belakang, kepentingan, dan motivasi media terhadap sebuah isu. Pakar *feminist* media, van Zoonen, (1997:1-28) menjelaskan bahwa proses produksi dalam industri media tidaklah sederhana tetapi merupakan proses negosiasi yang kompleks. Pakar tersebut mengadopsi pendekatan kultural dalam memahami relasi antara gender, kekuasaan dan media massa; dan dia melihat bahwa awak media secara aktif memproduksi nilai-nilai kultural dan bukan secara pasif merefleksikan kehidupan masyarakat. Besarnya peran reporter dalam mengkonstruksi pesan, maka menurut Ruigrok (2010: 85) motivasi dan integritas jurnalis dalam menyajikan sebuah isu patut diperhitungkan. Pakar lain menganggap media sebagai salah satu arena kultural, dan melalui teks atau pemberitaannya, seseorang bisa mempelajari posisi atau kedudukan dan mendefinisikan identitas suatu kelompok (Ross dan Byerly, 2004:42). Media bahkan bisa

memainkan peran dalam *misrepresenting* kebenaran dan dinamika kekuasaan (Curran, 2002: 138). Hasil penelitian Fatmah, Susilastuti, dan Basuki (2010:15) mendeskripsikan bahwa media massa berperan dalam membantu masyarakat dalam mengkritisi masalah-masalah sosial yang ada khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Subono (2003:60-64) menjelaskan ada dua pendekatan dalam jurnalisme, yang pertama adalah pendekatan yang netral atau objektif. Dalam pandangan kelompok pertama, hasil kerja jurnalis sama sekali tidak berkaitan atau bebas dari pertimbangan-pertimbangan gender. Sedangkan pendekatan kedua adalah pemberitaan yang berperspektif gender dimana kalangan jurnalis menu-angkan tulisannya dengan mendasarkan pada kepekaan gender. Pada pendekatan yang kedua ini, para jurnalis terutama yang perempuan memiliki hak untuk memilih tema-tema yang menarik menurut mereka dan diekspresikan dalam bingkai yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman jurnalis laki-laki. Faktanya, kalangan jurnalis perempuan pun sudah dikondisikan atau dikonstruksikan untuk menyajikan tulisan-tulisannya dalam pola laki-laki. Mereka hampir selalu ikut arus, seringkali memang tanpa pilihan untuk memberitakan apa yang disebut *hard news* seperti politik. Kalangan jurnalis pada umumnya sangat percaya bahwa berita memang tidak perlu diapresiasi secara gender. "Berita adalah berita" apakah itu ditampilkan oleh jurnalis laki-laki atau perempuan. Bagi mereka yang lebih penting adalah standar kesahihan atau keakuratan, keseimbangan, penyajian, dan penerapan etik yang secara setara terhadap semua jurnalis tanpa harus mempertimbangkan persoalan gender di dalamnya. Mengapa demikian? Hal ini bisa terjadi karena salah satu alasannya masih kuatnya kultur patriarki yang melekat dalam diri para jurnalis (Shetty, 2005:3). England (2010:162) memperjelas bahwa ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja akan mempengaruhi perilaku ketidaksetaraan gender di dalam keluarga dan demikian juga sebaliknya. Pada tahapan memproduksi teks di institusi media bisa terjadi kontradiksi, konflik antara kepentingan organisasi untuk mendapatkan keuntungan besar, dengan kepentingan profesional

yang selalu memperhatikan etika dan estetika penyajian hasil.

Guna memperkuat dasar berpikir teoretis, peneliti menambahkan teori *standpoint* (West and Turner, 2010: 501-511; Miller, 2005: 304-305). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perspektif terpisah, dan mereka tidak memandang segala sesuatu dari posisi yang setara. Lokasi-lokasi yang berbeda dalam hirarki sosial mempengaruhi apa yang dilihat. Perempuan dan minoritas yang lainnya mempersepsi dunia secara berbeda daripada kelompok yang berkuasa. Identitas dalam pandangan ini bukanlah suatu yang sifatnya esensial. Keperempuanan ataupun kelaki-lakian merupakan karya budaya yang sifatnya lokal. Di sini perempuan terposisikan pada hirarki sosial yang lebih rendah dibanding laki-laki, contohnya dari normalisasi tugas perempuan dalam rumah tangga (ranah domestik), dan laki-laki sebagai pencari nafkah.

Teori *standpoint* percaya hanya dengan suatu kerangka pemikiran yang mampu menembus pengetahuan yang bias gender, dan penundaan terhadap berbagai praduga (*stereotype*), maka cara pandang dunia kaum marjinal mampu diungkapkan. Pendekatan ini mengklaim sebagai pendekatan yang lahir dari perhatian terhadap orang kebanyakan, dan bukannya elit masyarakat. Sebagai pendekatan yang ikut dilahirkan oleh filsafat Marx, teori *standpoint* tetap berpegang pada dasar marxisme, yaitu materialisme historis, di-konseptualisasikan oleh Hartsock. Dalam hal ini

kemampuan seseorang untuk mengerti 'dunia' terbentuk dari kelas sosial dimana mereka berasal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kualitatif (Hennink, Hutter dan Bailey, 2011: 8-9). Data diperoleh dari media cetak nasional terkait isu hukuman pancung terhadap Ruyati dari tanggal 20 Juni sampai dengan 1 Juli 2011. Pemilihan tanggal tersebut didasarkan pada maraknya pemberitaan Ruyati yang berlangsung hampir dua minggu. Adapun sampel media cetak didasarkan pada surat kabar nasional yang ada di Jakarta. Pada awalnya peneliti mengamati pemberitaan Ruyati pada lima surat kabar yaitu Kompas, Republika, Media Indonesia, Koran Tempo dan Suara Pembaruan selama tiga hari berturut-turut dan membandingkan jumlah berita di antara kelima harian tersebut. Setelah itu, dipilih harian yang dianggap banyak memberitakan pemberitaan Ruyati, dengan asumsi bahwa koran yang menyajikan banyak berita pemancungan TKW, merupakan media cetak yang mempunyai kepedulian besar terhadap kasus tersebut. Selama masa observasi, tiga harian pertama rata-rata menyajikan tiga berita per hari tentang Ruyati, sedangkan dua koran terakhir hanya menyajikan rata-rata satu atau dua berita Ruyati. Akhirnya peneliti memilih Kompas, Republika dan Media Indonesia untuk diteliti. Mengingat peran narasumber perempuan menjadi penekanan dalam penelitian ini, maka berita yang dipilih untuk diteliti

Tabel 1. Framing Pertama

20 Juni 2011	Kompas (1)	Republika (2)	Media Indonesia (3)
Judul	Pemerintah Tak Dapat Hindari Hukuman	Pemerintah Terlambat	Perlindungan TKI Gagal, Ruyati Dipancung
Bingkai masalah	Pemerintah gagal melindungi warganya karena tidak bisa campur tangan.	Mempertanyakan tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah SBY tak segesit Gus Dur yg bisa menunda hukuman mati.	Pidato SBY di forum ILO hanya sebatas retorika saja. Pdhil masih ada TKI lain yg bermasalah. Metafora: Algojo, pancung, ajal.
Penyebab	(1) Mahkamah Tamyiz mengesahkan hukuman mati 14 Rajab 1431 H yg diperkuat MA. Qishah (2) Hukuman mati terjadi bbrp hari stl SBY pidato di ILO	Pemerintah tdk mau mengejar diplomasi tingkat tinggi antar kepala negara.	Pidato SBY tidak konsisten dengan faktanya.
Pertimbangan moral	Keputusan hukuman mati dirasakan timpang karena hanya memikirkan posisi majikan di Arab.	Menyalahkan SBY karena tdk bisa melakukan negosiasi seperti Gus Dur, padahal masih ada 23 TKI yg kasusnya tak ditangani dan bisa bernasib spt Ruyati	Bersimpati pada Ruyati. Ruyati merupakan orang ke 28 yg terkena pancung tahun 2011, masih ada 23 dari 1.2 juta WNI di Arab yang menanti ajal.
Rekomendasi	Pidato SBY jangan dikaitkan dengan hukuman mati.	Pemerintah hrs ikut bertanggungjawab	Ind hrs bersikap tegas, tapi jangan kaitkan hukuman mati dengan janji SBY di ILO

ti adalah yang menggunakan narasumber perempuan. Peneliti hanya menemukan 18 dari 101 berita. Tahap berikutnya, peneliti memilih tiga berita dari masing-masing koran yang menggunakan kolom terbesar dalam menyetengahkan kasus Ruyati. Pengumpulan data melalui media cetak dilakukan dengan teknik analisis framing digagas oleh Entman (Eriyanto 2002). Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan bahwa penekanan pada berita yang menggunakan narasumber perempuan menyebabkan terbatasnya variasi isu yang bisa dianalisis. Selain itu, penelitian ini tidak membedakan ideologi setiap surat kabar, padahal ideologi dari masing-masing koran mewarnai perspektif para awak medianya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mendeskripsikan isu yang dibingkai oleh surat kabar dalam koran Kompas, Republika, dan Media Indonesia.

Isu pertama, koran Kompas membingkai Pemerintah gagal membela TKI karena tak bisa campur tangan dalam putusan hukuman mati. Sementara itu, Republika mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dengan menekankan bahwa Pemerintah SBY tak segesit Gus Dur yg bisa menunda hukuman mati. Sedangkan Media Indonesia membingkai Pidato SBY di forum *International Labour Organisation* (ILO) hanya sebatas retorika saja, padahal masih banyak TKI lain yg bermasalah. Media Indonesia juga menggunakan metafora seperti algojo, pancung, ajal untuk menegaskan bahwa perlakuan hukuman mati bagi TKI dilakukan tanpa belas kasihan.

Framing pertama, pemberitan Kompas, melihat hukuman mati yang dialami oleh buruh migrant Indonesia, Ruyati, merupakan bentuk kegagalan pemerintah. Sekaligus menuduh pidato pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan ILO bukanlah kenyataan sesungguhnya. Meminjam argumen Wahyu Susilo (analisis kebijakan *migrant care*), yang mengatakan bahwa pidato Presiden masih jauh dari keadaan sesungguhnya, Kompas membangun keyakinan pembacanya, seolah bahwa pidato tersebut tidak lebih dari *lip service*.

Kompas melihat penyebab dari kegagalan melindungi Ruyati adalah lemahnya koordinasi dan

diplomasi. Guna menguatkan argumen tersebut, Kompas mengutip Rieke Diah Pitaloka (RDP) anggota komisi IX DPR, juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengatakan penyebab kegagalan pemerintah melindungi warganya merupakan akibat dari kelemahan koordinasi internal dan kemampuan lobi serta negosiasi di tingkat internasional.

Memasuki paragraf ketiga, mulai terlihat bahwa Kompas, berusaha melihat kasus Ruyati sebagai sesuatu yang seolah tidak dapat dihindari. Bantahan pemerintah terhadap kasus tersebut disampaikan dengan mengutip pernyataan Jumhur (Kepala BNP2TKI) serta juru bicara (jubir) presiden Julian Pasha: “Pemerintah Indonesia tentu tidak bisa mencampuri proses hukum yang terjadi di Negara lain”. Mengacu pada pernyataan Jubir Presiden, terlihat jelas bahwa Kompas berusaha mengukuhkan bahwa apa yang yang menimpa Ruyati seolah takdir. Satu-satunya kesalahan pemerintah adalah kelalaian dalam memperhatikan proses hukuman mati terhadap Ruyati, yang disertai argumen Marty (Menteri Luar Negeri disingkat Menlu), “pemerintah telah mendampingi Ruyati bahkan sejak awal kasus itu muncul dan disidangkan pada Januari lalu”. Di bagian akhir, Kompas menyalahkan sikap pemerintah Arab Saudi yang bersikap tidak adil pada Ruyati, dengan mengutip keluhan anak kandung Ruyati karena ibunya telah bekerja setahun empat bulan, tapi baru mendapatkan sembilan bulan gaji, dan kakinya patah karena didorong dan jatuh dari lantai dua oleh majikannya.

Dengan narasi tersebut, pembaca digiring untuk melihat bahwa putusan hukuman mati yang dijatuhkan mahkamah Arab Saudi terhadap Ruyati, bersifat timpang atau tidak adil. Pasalnya, putusan tersebut hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu terbunuhnya sang majikan, tanpa memperhatikan aspek-aspek kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap Ruyati, yang seharusnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan vonis.

Framing kedua dimulai dengan kalimat Pemerintah dinilai terlambat memberikan bantuan bagi Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung di Makkah, Arab Saudi. Paragraf ini didukung oleh pernyataan Anis Hidayah yang mencontohkan kasus serupa yang dialami Siti Zaenab pada tahun

1999 berhasil diselamatkan berkat jasa Gus Dur yang langsung menelepon Raja Fahd.

Republika membingkai penyebab masalah adalah pemerintah (Presiden) yang tidak mau mengejar diplomasi tingkat tinggi; dan koran ini menempatkan Anis sebagai narasumber pertama untuk memperkuat bingkai bahwa pemerintah dinilai sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab, dengan mengetengahkan pendapat Anis bahwa masih ada 23 TKI yang nasibnya akan seperti Ruyati jika tidak ditangani secara cepat oleh Presiden.

Pemerintah, melalui Menteri HAM, sebagai pihak yang disalahkan kemudian menuding pemerintah Arab Saudi yang tidak memberitahukan informasi mengenai hukum pancung Ruyati kepada Kedubes RI. Argumen pemerintah diperkuat oleh Kepala BP2TKI yang menyatakan bahwa permintaan maaf telah diajukan, namun keluarga korban tidak mau memberi maaf. Di sini jelas Republika ingin memaparkan argumen-argumen yang dapat memperkuat pembelaan pemerintah. Akhirnya pada paragraf penutup Republika menggunakan pernyataan keluarga Ruyati yang memandang hukuman mati tidak layak diberikan kepada Ruyati karena almarhumah sering dianiaya.

Melalui cara penuturan di atas terlihat bahwa Republika sebenarnya memaparkan kasus Ruyati dari tiga sudut pandang berbeda: pihak yang peduli TKI dan menuding pemerintah sebagai penyebabnya, suara pemerintah yang berusaha mem-

bela diri dengan menyalahkan pihak Arab Saudi, dan pernyataan keluarga yang tidak menyetujui hukuman yang didapatkan tanpa dengan sengaja menyalahkan kedua belah pihak.

Framing ketiga dibuka dengan ulasan mengenai pidato SBY di Konferensi ILO yang dinilai tidak konsisten dengan fakta yang terjadi di lapangan karena perlindungan buruh migran hanya merupakan konsep pidato. Jelas koran ini mempertegas bahwa pemerintah sebagai posisi yang paling bertanggung jawab atas kejadian Ruyati. Terlihat bahwa koran ini memilih Anis sebagai narasumber secara sinis menanggapi pemerintah sebagai berikut: "Dalam soal hukuman mati terhadap pembantu rumah tangga migran dan warga negara Indonesia di luar negeri, diplomasi luar negeri Indonesia terlihat sangat tumpul." Pendapat serupa bahwa dikemukakan anggota DPR Rieke yang menilai bahwa sikap pemerintah lamban dalam merespon kasus yang menimpa Ruyati, padahal dalam pidato di ILO, Presiden berjanji memperhatikan kesejahteraan TKI.

Media Indonesia berusaha memposisikan diri sebagai media berita yang peduli TKI dengan menampilkan berbagai pernyataan yang berfokus pada perlindungan dan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya di luar negeri yang dinilai gagal. Koran tersebut mengetengahkan bahwa Ruyati merupakan orang ke-28 yang mendapat hukuman pancung di tahun 2011, dan masih ada 23 TKI lagi dari 1,2 juta WNI di Arab Saudi yang menanti ajal mereka. Selain itu juga mem-

Tabel 2. Framing Kedua

22 Juni 2011	Kompas (4)	Republika (5)	Media Indonesia (6)
Bingkai masalah	Perlu Jeda penempatan TKI Tak ada penghargaan yg layak terhadap perempuan sebagai pekerja 1999-2011 ada 303 kasus TKI terancam hukuman mati, 216 masih disidang.	Pulangkan Jenazah Ruyati Pemerintah (BNP2TKI) tidak menghargai hak-hak Ruyati karena masih banyak TKI punya kasus sama.	Hentikan Pengiriman TKI Ke Arab Saudi Tanpa memperbaiki sungguh-sungguh kebobrokan penanganan TKI, kekejaman terhadap TKI hanya menunggu waktu untuk terjadi lagi
Penyebab	Penyebab: BNP2TKI dan lembaga terkait TKI semrawut	Sistem penanganan TKI tak berjalan dengan baik	Kurangnya <i>goodwill</i> terlihat dari kecenderungan percepat pembahasan revisi MoU
Pertimbangan moral	Membela TKI pelecehan seksual, pembunuhan dan terlantarnya TKI di Saudi perlu segera di atasi. Dan berpihak pada pemerintah bahwa tidak semua TKI bermasalah	Walau semasa bekerja TKI tak dihargai, tapi setelah meninggal perlu ada penghargaan, namun memulangkan jenazah bukan perkara yg mudah.	Mempertanyakan moral pejabat yang diukur dari komitmen pada kemanusiaan rakyatnya baik di dalam maupun di luar negeri.
Rekomendasi	Mengajak pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman TKI.	Pemerintah diminta membentuk Satgas untuk menangani nasib ratusan TKI lain yang terancam hukuman mati; Pemerintah harus berusaha memulangkan jenazah Ruyati.	Mendesak pemerintah melakukan moratorium TKI ke negara yg belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan belum ada perjanjian kerja dengan Indonesia. Pemerintah diminta membentuk Satgas.

perkuat keberpihakannya melalui pakar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Hikmahanto Juwana yang menanggapi bahwa sudah saatnya Pemerintah bersikap tegas memperlihatkan tindakan diplomatiknya.

Framing keempat menunjukkan sikap Kompas yang lebih jelas karena sejak awal koran tersebut telah mengajak pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman TKI ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian hukum perlindungan TKI. Kompas menilai langkah penghentian sementara (*moratorium*) sebagaimana disuarakan DPR, perlu ditindaklanjuti segera atau sangat mendesak, sebab, kasus hukuman mati yang dialami Ruyati, bukanlah yang pertama, pada tahun 2000. Pemerintah Arab Saudi juga pernah menghukum pancung TKI Warni binti Samiran, tanpa memberi tahu kedubes RI dan keluarga korban. Tidak hanya itu, sepanjang tahun 1999-2011, menurut data Kementerian Luar Negeri (Kemenu) setidaknya ada 303 TKI yang terancam hukuman mati, dan 216 di antaranya masih dalam proses persidangan. Serangkaian alasan itulah yang diajukan Kompas kepada pembacanya untuk meyakinkan *moratorium* sebagai tindakan paling logis saat ini.

Masalah hukuman mati bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi TKI di luar negeri, khususnya TimTeng. Mengutip pernyataan Eva Kusuma Sundari (Wakil ketua tim khusus pemantuan TKI), Kompas mengetengahkan kompleksitas masalah yang dialami TKI PRT (pekerja rumah tangga) di TimTeng. “Gaji yang tidak di-

bayarkan, pemutusan kerja, pelecehan seksual, pembunuhan, dan telantarnya TKI di Arab Saudi perlu segera diatasi,” ujarnya.

Setelah mengurai berbagai soal yang melingkupi TKI di TimTeng, Kompas melangkah pada usul moratorium sebagai jawaban dengan mengetengahkan pandangan, Rusdi Basalamah (Sekjen Apjati) dan Wahyu Susilo yang mengusulkan kebijakan Moratorium selama setidaknya empat bulan, untuk membenahi carut marutnya persoalan TKI dan dibutuhkannya waktu jeda selama setahun. Menurutnya, ini adalah kebijakan paling tepat bagi pemerintah demi kebaikan semua.

Berbagai pernyataan di atas, tidak hanya merupakan sikap dukungan terhadap kebijakan *moratorium*, melainkan sekaligus pertanda dari semakin bergesernya sikap Kompas, yang tadinya setengah-setengah menyalahkan pemerintah, menjadi sikap yang semakin bulat menuduh pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. *Framing* di atas menunjukkan BNP2TKI dianggap sebagai lembaga yang tidak memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan kerja bagi TKI dan merupakan lembaga yang semrawut.

Framing kelima merupakan *headline* Republika. Berita ini difokuskan pada masalah pengakuan kesalahan oleh pemerintah dan itikad mengganti kerugian yang bisa diwujudkan, sebagaimana hasil rekomendasi yang dikeluarkan rapat sidang paripurna DPR. DPR mendesak pemerintah untuk memulangkan jenazah Ruyati. Sebagai pendukung dipilihlah Priyo Budi Susanto (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang menyatakan

Tabel 3. *Framing* Ketiga

	Kompas 23 Juni (7)	Republika 25 Juni (9)	Media Indonesia 30 Juni (8)
	Indonesia desak Arab Saudi	Saudi Bantah Minta Maaf	16 Ribu Paspor TKI dari satu Desa di Sukabumi
Bingkai Masalah	Negosiasi dengan Arab Saudi terkait perlindungan TKI	Tidak ada kejelasan apakah Kerajaan Saudi sudah mengakui kelalaian atas eksekusi mati TKI Ruyati.	Meragukan Satgas bisa melaksanakan tugasnya
Penyebab	Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai eksekusi mati TKI tanpa pemberitahuan kepada pemerintah RI.	Penyebab: ada perbedaan antara pernyataan Menlu dan Pemerintah Arab Saudi	Penyebab: Proses pengiriman TKI sarat dengan mafia karena penerapan sistem satu pintu dalam pembuatan dokumen calon TKI.
Pertimbangan Moral	Perlindungan TKI perlu dibahas antar negara secara serius	Pemerintah Arab Saudi meremehkan Pemerintah RI	Prosedur sudah benar legal hanya dokumennya aspal, karena ada praktik mafia.
Rekomendasi	Jangan terburu-buru bernegosiasi perlu masukan dari semua institusi terkait terutama masyarakat sipil; Pemerintah juga harus menjadikan Konvensi ILO 169 sebagai dasar isi MoU.		Anggaran Satgas sebesar Rp 100 miliar dialokasikan untuk pendampingan TKI yang bermasalah dan terancam hukuman mati di luar negeri.

bahwa pemerintah harus instropeksi diri melalui penghentian sementara (*moratorium*) pengiriman TKI terutama pekerja rumah tangga ke negara yang tak mau bekerja sama menekan *Memorandum of Understanding* (MoU). Ia, yang peduli terhadap nasib TKI, juga menyarankan agar pemerintah menangani sistem TKI yang selama ini dinilai tidak berjalan dengan baik. DPR juga mendesak pemerintah untuk membentuk satgas yang menangani 303 TKI yang terancam hukuman. Pernyataan-pernyataan DPR bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan kepada TKI dan memandang diri mereka sebagai bukan bagian dari pemerintah yang harus bertanggung jawab. DPR tidak hanya dilihat sebagai pihak yang menyalahkan namun juga sebagai pihak yang memberi solusi, sehingga menggiring pembaca menilai DPR sangat netral dan membela korban dalam kasus Ruyati ini.

Dari sisi keluarga, Republika kembali menampilkan Evi, anak Ruyati, sebagai narasumber berita mereka yang menyatakan: “Pemakaman jenazah, bagi keluarga, merupakan tanda penghormatan terhadap kerja keras almarhumah mencari nafkah.” Sebaliknya, pemerintah melalui kemenlu menyatakan bahwa bukan hal yang mudah untuk memulangkan jenazah karena terkait dengan tata cara Saudi yang langsung memakamkan setiap orang yang dieksekusi. Pernyataan berikutnya datang dari narasumber, Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) terkait moratorium dan rencana mempersiapkan tahapan kebijakan dengan matang dan dalam waktu dekat. Solusi berikutnya adalah dengan memperbanyak pengacara yang membela TKI.

Framing keenam dibuka dengan kekecewaan DPR terhadap hukuman mati yang menimpa Ruyati dan mengajukan lima rekomendasi. Dalam hal ini, Media Indonesia memberi tekanan pada poin penghentian pengiriman TKI atau moratorium. Diharapkan agar moratorium akan memberi kesempatan pada pemerintah untuk melakukan pembenahan lembaga secara total, termasuk mengupayakan nota kesepahaman dengan negara tujuan TKI. Tampak Media Indonesia mencoba meyakinkan pembacanya bahwa BNP2TKI tidak lagi bisa diandalkan sebagai akibat dari kegagalan para pemimpinnya.

Dari sini dapat dilihat bingkai kritik yang dibangun oleh Media Indonesia mengarah pada

rezim atau otoritas yang berkuasa saat ini. Sementara pada bagian lain berita tersebut, yang diberi sub judul ‘tidak optimal’, seolah merupakan pengakuan pemerintah. Alih-alih memberlakukan moratorium sebagaimana yang diharapkan DPR, pemerintah justru melakukan pembicaraan bilateral dengan Arab Saudi untuk mencapai kesepakatan nota kesepahaman tentang TKI.

Upaya membicarakan nota kesepahaman tanpa melakukan moratorium, dilihat oleh Media Indonesia sebagai bentuk kelemahan dari pemerintah yang berkuasa. Sikap ini dinilai lemah dan tidak pro TKI. Narasi ini sekaligus dibarengi oleh apa yang dinilai Media Indonesia sebagai bentuk pengakuan akan kegagalan melindungi TKI di Tim-Teng, seperti yang tampak pada pernyataan, Reyna Usman (Pejabat Binapenta Kemenakertrans) bahwa jaringan pemerintah untuk melindungi TKI masih kurang dan belum optimal.

Kegagalan ini bukanlah menyangkut soal dana, dalam paragraf terakhir, Media Indonesia mengungkapkan pernyataan, Agus Martowardojo (Menteri Keuangan) yang mengatakan dana yang telah dianggarkan untuk upaya perlindungan TKI di luar negeri mencapai Rp 95 milyar. Dengan kata lain, Media Indonesia menuduh apa yang selama ini membuat berbagai upaya perlindungan terhadap TKI terhambat adalah karena kurang kompetennya pejabat yang ditugaskan.

Kompas dan Media Indonesia mempunyai bingkai yang serupa dalam menyajikan keberlanjutan kasus Ruyati. Kedua surat kabar itu menganggap bahwa Indonesia diremehkan oleh Arab dengan menyajikan tulisannya bahwa Tidak ada penjelasan resmi dari Arab Saudi. Bahkan Media Indonesia membandingkan Pernyataan Pemerintah dan wakil Arab Saudi yang bertentangan dengan pernyataan Menlu tentang apakah Arab sudah menyampaikan penyesalan atau tidak. Sementara itu Republika menggarisbawahi bahwa proses pengiriman TKI di semua institusi terkait sarat dengan mafia.

Framing ketujuh, dalam pemberitaan Kompas menceritakan upaya Kemenlu Indonesia yang melayangkan nota protes keras terhadap pemerintah Arab Saudi, yang disampaikan melalui Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Mohammed Amen al-Khayat. Proses hukuman mati yang dialami warga Negara Indonesia, Ruyati

binti Satubi, yang tanpa pemberitahuan terlebih dulu pada pihak Indonesia, merupakan pelanggaran kode etik diplomasi internasional. Nota protes dilayangkan demi meminta penjelasan resmi mengapa hal demikian dapat terjadi. Namun, tidak hanya itu, momen dihukum matinya Ruyati, dijadikan kesempatan oleh Kemenlu RI untuk mendesak Arab Saudi merumuskan nota kesepahaman tentang perlindungan TKI. Pada berita ini, Kompas mendefinisikan persoalan yang dialami TKI, merupakan akibat dari tidak adanya perlindungan hukum bagi buruh migran. Pernyataan Jubir Kemenlu, Michel Tene, juga dikutip sebagai pendukung; “Dalam surat itu kami juga meminta kejadian yang sama jangan lagi terulang. Kemlu juga meminta Arab Saudi bersedia bekerjasama meningkatkan mekanisme perlindungan terhadap TKI.”

Kutipan di atas menjelaskan posisi Kompas yang meminta pemerintah untuk menjadikan hukuman yang diterima Ruyati sebagai momentum untuk membangun perjanjian bersama perlindungan TKI agar di masa yang akan datang tidak ada lagi TKI yang bernasib seperti Ruyati. Lebih lanjut Kompas meminjam argumen Anis Hidayah yang berusaha meyakinkan pembacanya, agar upaya pembuatan payung hukum bagi TKI, tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pada bagian akhir artikel tersebut, Kompas mengajak pembacanya untuk mendorong pemerintah melakukan tanggung jawab pada jasad seorang warga negara, dengan mengetengahkan pernyataan bahwa bila pemerintah tak bisa melindungi seorang TKW semasa hidup, maka setidaknya pemerintah bisa mengupayakan agar jenazah Ruyati dapat dipulangkan, sebagai bentuk penghormatan terakhir pada almarhum dan keluarga korban.

Framing kedelapan pemberitaan Media Indonesia dibuka dengan kalimat yang provokatif. Pengiriman TKI ke luar negeri dianggap sarat dengan praktek mafia. Indikasinya adalah temuan *Migrant Care* yang menemukan 16 ribu paspor ataupun dokumen yang ternyata palsu karena menggunakan alamat yang sama, yaitu Desa Tegalle, Kecamatan Cilodong, Sukabumi, Jawa Barat, padahal penduduknya hanya sekitar 6.000 orang. Di sini Media Indonesia menunjukkan bahwa mafia jugalah yang memungkinkan ke 16.000 TKI tersebut masuk dalam kategori TKI legal.

Fakta ini menggiring khalayak pembacanya untuk melihat praktek mafia yang merugikan TKI dilakukan oleh oknum-oknum yang ada dalam pemerintahan sendiri. Dengan kata lain koran tersebut menuding pemerintah sebagai penyebab kesengsaraan TKI.

Faktor penyebab masalah TKI yang ditekankan Media Indonesia tidak hanya soal mafia, akan tetapi juga, lemahnya sistem birokrasi yang ada ikut bertanggung jawab atasnya. Melalui Anis Hidayah, koran ini memaparkan pernyataannya bahwa para mafia bebas bergerak karena penerapan sistem satu pintu dalam pembuatan dokumen calon TKI, padahal tahun 2004 itu pembuatan paspor masih harus dilakukan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Mengacu pada pernyataan Anis, permasalahan yang dihadapi TKI, bukan lagi sekedar masalah orang perorangan yang menjadi oknum, melainkan permasalahan sistemik. Sementara upaya pemerintah untuk menanggulangi kasus Ruyati dan TKI melalui Pembentukan Satgas dianggap hanya akan membuang-buang uang, sebab Kemenlu yang memiliki kewenangan berhubungan dengan negara lain, tidak mampu berbuat banyak, apalagi Satgas yang kewenangannya hanya di dalam negeri. Untuk meyakinkan pembacanya, koran tersebut memuat argumen Anis Hidayah yang mengatakan bahwa uang seratus milyar rupiah bagi anggaran Satgas, akan lebih baik dipergunakan untuk pendampingan TKI yang bermasalah dan terancam hukuman di luar negeri.

Bagian kedua berita ini memaparkan pertemuan presiden dengan kedubes Arab Saudi yang diungkapkan Teuku Faizasyah (penasehat presiden bidang hubungan internasional) sebagai upaya penyelesaian persoalan TKI. Isu tersebut kemudian dikontraskan dengan paragraf berikutnya tentang tertangkapnya 13 TKI ilegal di Kupang, dan tertahannya 1.440 calon TKI asal Cirebon yang akibat kebijakan moratorium. Dua paragraf terakhir, menunjukkan bagaimana upaya penyelesain pemerintah yang dilakukan melalui moratorium ataupun kebijakan diplomatik sebagaimana yang dilakukan Presiden, belum mampu menjawab persoalan, dan sekali lagi korbannya adalah TKI.

Framing kesembilan mempertanyakan mengenai kebenaran permohonan maaf Arab Saudi terkait kasus Ruyati. Bantahan Saudi sangat

terkait dengan pernyataan Marty sebelumnya bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menyampaikan permintaan maaf terkait dengan kasus Ruyati. Padahal Dubes RI di Saudi merasa bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak pernah menyampaikan permohonan maaf. Ia juga mengemukakan ketidaktahuannya jika pemerintah RI memang melakukan lobi langsung pada pejabat terkait. Sayangnya Menlu RI pun tidak mau menanggapi bantahan tersebut.

Rieke atau RDP sebagai tim pengawasan perlindungan TKI dijadikan sebagai narasumber yang mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan keberadaan dan kondisi 58 kasus TKI bermasalah yang di antaranya 35 kasus pembunuhan. Pernyataan RDP ini seakan ingin menyatakan tidak penting siapa yang berbohong antara pemerintah RI dengan Arab Saudi, tapi yang paling penting adalah solusi terhadap perlindungan TKI yang terancam bernasib seperti kasus Ruyati.

Isu apa yang dibingkai ketiga surat kabar di atas? Seperti tampak pada analisis sebelumnya, ketiga surat kabar, yang menjadi subjek dalam penelitian ini, memiliki caranya sendiri-sendiri dalam membingkai kasus Ruyati. Namun ada kesamaan di antara ketiganya yaitu besarnya sorotan media terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus TKI. Tentu saja ada beberapa hal yang membedakan ketiganya, di antaranya soal pihak yang paling bertanggung jawab atas soal TKI dan solusi dalam menangani persoalan TKI.

Kompas merupakan media yang bisa dikatakan bersikap paling ramah pada pemerintah. Semenjak awal pemberitaan kasus Ruyati, seperti yang tampak dalam berita berjudul “Pemerintah Tidak Dapat Hindari Hukuman”, meski pada awal berita, terlihat sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, maka pada pertengahan dan akhir berita tersebut Kompas berupaya meyakinkan pembacanya bahwa apa yang menimpa Ruyati di luar kekuasaan pemerintah. Bahkan bisa dikatakan sebagai takdir. Kompas membangun argumentasi yang selaras dengan apa yang juga coba dikatakan pemerintah, bahwa persoalan hukum yang terjadi di Arab Saudi di luar jangkauan pemerintah. Kompas berupaya mengarahkan tudingan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab pada pemerintah

Arab Saudi yang dinilai bersikap tidak adil pada Ruyati. Tudingan itu dilatarbelakangi oleh fakta yang seolah diabaikan oleh pengadilan Arab Saudi ketika menjatuhkan hukuman pada Ruyati, yaitu bahwa selama bekerja di Arab Saudi Ruyati kerap kali mengalami siksaan dari majikannya.

Pada berita-berita selanjutnya menyoal Ruyati dan TKI, Kompas seolah membelokkan arah terangnya, dari mencari siapa yang salah, pada upaya penanggulangan persoalan TKI. Sikap ini kembali menegaskan posisi Kompas yang menolak untuk menuding pemerintah sebagai aktor utama penyebab gagalnya perlindungan terhadap TKI.

Hal yang sangat berbeda kita dapati dari Republika. Semenjak awal Republika telah mengarahkan telunjuk pada pemerintah. Dalam berita yang turun sebagai *headline* tersebut, Republika menilai apa yang menimpa Ruyati disebabkan oleh lambannya kinerja pemerintah. Tidak hanya lamban, pemerintah juga dikesankan lembek atau takut pada pemerintah Arab Saudi. Dalam berita yang lain, sikap Republika kian kentara. Berita yang turun dalam format wawancara dengan Anis Hidayah kian menunjukkan bagaimana pemerintah diposisikan Republika dalam Kasus TKI. Pemilihan Anis Hidayah sebagai tokoh yang diwawancarai merupakan sikap tersendiri, pasalnya, ia dikenal lantang berbicara mengkritik pemerintah di berbagai media menyangkut kasus Ruyati. Sikap kritik Republika terhadap pemerintah dalam kasus TKI, terus menerus muncul dalam pemberitaannya, meskipun semakin tidak menjadi teman utama. Menjelang akhir Juni, isu yang berkembang hampir disetiap media, menyoalkan solusi penyelesaian kasus TKI, Republika pun ikut arus ini.

Meski sama-sama melakukan kritik yang keras terhadap pemerintah, cara yang dipilih Media Indonesia, berbeda dengan Republika. Jika Republika fokus pada pemerintah dalam pengertian rezim yang berkuasa, maka sasaran Media Indonesia sifatnya lebih makro, mereka membingkai persoalan TKI dalam kerangka kegagalan yang sifatnya sistemik. Cara pandangan semacam ini terutama terlihat dalam berita berjudul “16 Ribu Paspor TKI dari Satu Desa yang Sama di Sukabumi”. Dengan fakta itu, Media Indonesia sedang hendak mengatakan ada praktek mafia dalam proses pemberangkatan TKI ke luar negeri dan

aparatus pemerintah terlibat di dalamnya. Praktek mafia dinilai Media Indonesia mungkin terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem birokrasi.

Dari sinilah dapat ditemui gagasan yang lebih makro dalam melihat persoalan TKI. Kesengsaraan yang dialami TKI, bukan semata-mata kesalahan pemerintah yang berkuasa. Melainkan merupakan bentuk praktek mafia yang telah mengakar dalam birokrasi pemerintah. Kiranya inilah yang bisa dikatakan membedakan kritik Media Indonesia dengan Kompas dan Republika. Gagasan yang sama dapat kembali ditemukan dalam berita lain berjudul "Hentikan Pengiriman TKI ke Arab Saudi". Gagalnya upaya perlindungan TKI di TimTeng dilihat sebagai persoalan pemerintah yang tidak memiliki jaringan yang terorganisir untuk tujuan itu. Karenanya solusi yang ditawarkan Media Indonesia dalam rangka penyelesaian kasus TKI pun sedikit berbeda dengan Kompas dan Republika. Meski ketiga media tersebut menawarkan solusi yang hampir sama dalam penyelesaian kasus TKI, yaitu moratorium pengiriman TKI ke negara-negara yang belum memiliki nota kesepahaman mengenai perlindungan TKI, Media Indonesia lebih menekankan pada pembenahan persoalan internal yang lebih menyangkut birokrasi pemerintah dan praktek mafia hukum yang dimungkinkan oleh adanya celah dalam birokrasi tersebut.

Hasil penelitian ini memperlihatkan kecenderungan Republika lebih mengarah pada sikap tegas pemerintah terhadap negara-negara pengguna jasa TKI dan moratorium sebagai upaya mendesak negara-negara tersebut untuk segera menandatangani nota kesepahaman perlindungan TKI. Republika terus-menerus menyoroti perihal buruknya kinerja pemerintah dalam penyelesaian masalah TKI. Hal yang sama juga diharapkan oleh Kompas, hanya saja dengan penekanan yang sedikit berbeda. Berbeda dengan Republika, Kompas tidak banyak bicara mengenai pembenahan internal pemerintah, bahkan cenderung menunjukkan upaya-upaya yang tengah dilakukan pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI. Meski tawaran solusi dari tiga media tersebut tampak berbeda satu sama lain, sesungguhnya lahirnya gagasan penyelesaian masalah TKI dalam Media Indonesia, Kompas, dan Republika diawali oleh keyakinan bahwa TKI adalah korban yang

tidak berdaya. Dengan begitu semua kembali terpulang pada upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya perlindungan terhadap TKI, terkecuali TKI itu sendiri.

Bila dikaitkan dengan *standpoint theory* yang menekankan hubungan majikan dan buruh atau kelompok dominan dan submisif, laki-laki dan perempuan, maka terlihat dikotomi menarik. Ada dikotomi antara pihak dominan di satu sisi yang diwakili oleh majikan, pemerintah, perusahaan pengiriman TKI, pusat kekuasaan dan sosok laki-laki, di sisi lain terdapat pembantu rumah tangga, masyarakat miskin, lembaga swadaya masyarakat, minus kekuasaan dan sosok perempuan. Secara kuantitas juga bisa dilihat bahwa suara pihak penguasa atau kelompok dominan lebih banyak disajikan daripada suara korban. Kaum TKW yang biasanya menjadi korban kekerasan tidak diberi posisi berarti untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan kata lain, media masih berpihak pada kepentingan kelompok dominan yang mayoritas narasumbernya adalah laki-laki. Hal ini berarti isu TKW dimaknai dari sudut pandang kaum laki-laki dan melalui merekalah isu-isu persoalan TKW didefinisikan. Dampak dari pemberitaan semacam ini bisa menenggelamkan kepentingan kaum perempuan (TKW) sebagai korban kekerasan, pelecehan, perkosaan dan lain sebagainya.

Hubungan antara PRT dan majikan, kelas borjuis dan proletar selama ini dibangun di atas ideologi dominan, disadari atau tidak telah meresap dalam struktur budaya kemasyarakatan. Bagi media, isu TKW bukanlah merupakan isu yang besar, seperti isu korupsi, sehingga frekuensi pemberitaan tidak dilakukan secara rutin dan akibatnya kurang mendapat perhatian dari khalayak. Dalam terminologi proses produksi berita, isu TKW baru menjadi bahan pembicaraan yang 'panas' dan aktual ketika terjadi hukuman pancung atas Ruyati, atau ada peristiwa penganiayaan, hukuman mati ataupun kekerasan dan lain sebagainya. Hukum pasar jurnalistik menghendaki berita yang 'panas' saja yang layak untuk dijual. Hukuman mati terhadap Ruyati mendapat respons intensif dari media, namun motivasi ekonomi media menjadi pendorong utama sesaat, dan untuk *follow up news*, media cenderung menyisihkan isu-isu TKI sebagai isu lunak. Terdapat

ungkapan TKI sebagai pahlawan devisa, maka hal ini seolah terlihat seperti konotasi yang positif, namun bila diperhatikan sebutan yang demikian justru mendehumanisasi, pasalnya subjek TKI hanya disejajarkan dengan uang, tidak beda halnya dengan produk.

Simpulan

Dari pemaparan narasumber laki-laki dan perempuan terlihat penekanan yang berbeda dalam merespons kasus Ruyati. Simpulan dari penelitian ini bahwa; *pertama*, suara pejabat pemerintah yang sebagian besar adalah laki-laki cenderung menekankan penyelesaian kasus yang melilit TKW haruslah dilakukan secara prosedural sesuai dengan hukum di Arab, dan juga prosedur birokrasi di negara ini. Penyelesaian persoalan TKW terkait dengan masalah politis dan ekonomis, maka wacana permintaan maaf dari negara Saudi Arabia, pentingnya kebijakan moratorium sebagai solusi jangka pendek, perlunya penghitungan dana bagi perlindungan TKW, dan dana bagi pembentukan satuan tugas merupakan bingkai dari media. Perhitungan untung-rugi terhadap pemberlakuan moratorium pun dianggap penting karena akan berdampak pada tersendatnya pengiriman TKI ke luar negeri yang akan mengakibatkan penurunan remitansi. Di sisi lain pernyataan aktivis dan politisi perempuan menggarisbawahi bahwa usaha penyelamatan TKW masih sebatas wacana, karena itu suara mereka menekankan pada kepentingan yang mendesak untuk menyelamatkan individu TKW yang terancam hukuman mati. Ketika terjadi ancaman hukuman mati, maka penyelamatan terhadap terdakwa tidak bisa lagi dilakukan melalui jalur hukum dan birokrasi namun perlu sebuah terobosan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, yaitu diplomasi tinggi di antara kepala negara. Hal ini penting karena tidak sedikit mereka yang terancam hukuman mati dalam waktu dekat ini dan perlu penanganan yang cepat. Aktivis dan politisi perempuan mendesak pemerintah agar tak mengelak dari tanggung jawab menyelamatkan TKW dengan berdalih kasus ini masuk lingkup pidana sehingga tidak bisa mengintervensi.

Kedua, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa narasumber perempuan juga memahami

perlunya upaya pembuatan payung hukum sebagai solusi dari mengurai persoalan TKW. Narasumber laki-laki menggarisbawahi perlunya peraturan itu dibuat sesegera mungkin, maka aktivis perempuan menegaskan agar pembuatan hukum itu perlu dilakukan tanpa tergesa-gesa dengan lebih memperhatikan kepentingan TKW, karena kompleksnya persoalan yang melilit TKW.

Ketiga, pemberitaan tentang suara perempuan lain berasal dari anak perempuan Ruyati yang digambarkan secara dramatis, terutama penekanan pada cerita anak Ruyati tentang perlakuan majikan di Saudi Arabia terhadap Ruyati yang tidak manusiawi. Pemberitaan yang dramatis selalu mewarnai kasus Ruyati, seolah fenomena tersebut merupakan isu yang menarik dijual oleh media dan merupakan kesempatan dalam meraih meningkatkan penjualan media. Sebaiknya media tidak melakukan hal tersebut.

Keempat, pemberitaan tentang persoalan TKI ataupun penyajian suara narasumber perempuan hanya dapat terjadi ketika pekerja media telah menyadari pentingnya penggunaan perspektif gender di dalam industri media.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, yang telah memberikan Dana Penelitian pada tahun 2011.

Daftar Pustaka

- Chambers, Deborah; Linda Steiner and Carole Fleming, 2004, *Women and Journalism*, Routledge, London.
- Cosslett, Tess; Alison Easton and Penny Summerfield, 1996, *Women, Power and Resistance: An Introduction to Women's Studies*, Open University Press, Buckingham.
- Curran, James, 2002, *Media and Power*, Routledge, London.
- Dewi, Machya Astuti, 2009, MediaMassa dan Penyebaran Isu Perempuan, *Jurnal Ilmu Komunikasi* (terakreditasi), Volume 7

- nomor 3, September-Desember 2009, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LkiS Yogyakarta.
- England, Paula, 2010, The Gender Revolution: Uneven and Stalled, dalam *Gender and Society*. 24: 2, halaman: 149-166.
- Geruh, Fatmah Yeni, Susilastuti, dan Basuki, 2009, Berita Kekerasan dalam Rumah Tangga di Harian Kompas, *Jurnal Ilmu Komunikasi* (terakreditasi), Volume 8 nomor 1, Januari-April 2010, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Hennink, Monique; Inge Hutter & Ajay Bailey, 2011, *Qualitative Research Methods*, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Hidayah, Anis, 2011, Gelar Raja dan Tragedi Buruh Migran, *Kompas*, 6 September 2011, halaman 6, Jakarta.
- <http://bnp2tki.go.id>
- <http://ditpolkom.bappenas.go.id>
- Miller, Katherine, 2005, *Communication Theories: Perspectives, Processes and Context*: McGraw Hill, New York, NY.
- Norris, Pippa, 1997, *Women, Media and Politics*, Oxford University, New York, NY.
- Poindexter, Paula; Sharon Meraz; Amy Schmitz Weiss, 2008, *Women, Men and News: Divided and Disconnected in the News Media Landscape*, Routledge New York, NY.
- Ross, Karen and Carolyn Byerley, 2004, *Women and Media, International Perspective*, Blackwell Publishing Co, Malden, MA.
- Ruigrok, Nel, 2010, From Journalism of Activism towards Journalism of Accountability, dalam *The International Communication Gazette*, 72:1, halaman 85-90.
- Sarwono, Billy K, 2010, Pemaknaan Isu Pemantasan Global dan Lingkungan di Media oleh Kaum Perempuan Urban, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, volume 8 nomor 2, Mei-Agustus, halaman 178-190, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.
- _____, 2010, 'Indonesia the Marginalized Motherland' dalam Elisabeth Eide, Risto Kunelius & Ville Kumpu, *Global Climate Local Journalism: A Transnational Study How Media Make Sense of Climate Summits*, Projektverlag, Bochum.
- Shetty, Kavitha, 2005, Newspaper Management for Women Journalists, dalam *Media Asia: An Asian Communication Quarterly*, 21: 1, halaman: 3.
- Subono, Nur Imam, 2003, Menuju Jurnalisme Yang Berperspektif Gender, dalam *Jurnal Perempuan* 28, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Van Zoonen, Liesbet, 1994, *Feminist Media Studies*, Sage, Thousand Oaks, CA.
- West, Richard and Lynn H. Turner, 2010, *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*, McGraw Hill, New York, NY.
- www.kompas.com
- www.mediaindonesia.com
- www.republika.co.id